



**Andi Rosdianti
 Razak¹
 Muhammad Yahya²
 Sudarmi³**

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan publik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber akademik dan laporan kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dana Desa berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif. PKH memberikan bantuan tunai bersyarat yang mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, sementara Dana Desa meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi lokal. Namun, kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah ketepatan sasaran dan kurangnya pendampingan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik meliputi perencanaan dan implementasi, partisipasi masyarakat, serta kondisi geografis dan ekonomi setempat. Disarankan agar kebijakan publik dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta memberikan dukungan berkelanjutan bagi penerima manfaat. Dengan demikian, kebijakan publik dapat lebih efektif dalam menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat

Abstract

This study aims to analyze the impact of public policies on the economic empowerment of communities in Indonesia. The method used is a literature review, collecting and analyzing various academic sources and related policy reports. The results show that policies such as the Family Hope Program (PKH) and Village Funds successfully enhance community welfare through thorough planning and effective implementation. PKH provides conditional cash transfers that promote access to education and health, while Village Funds improve infrastructure development and local economies. However, policies such as Direct Cash Assistance (BLT) and People's Business Credit (KUR) face various challenges, including targeting accuracy issues and lack of support. Factors influencing the success of public policies include planning and implementation, community participation, and local geographical and economic conditions. It is recommended that public policies be designed considering local needs and involve active community participation, as well as providing ongoing support for beneficiaries. Thus, public policies can be more effective in creating positive and sustainable changes for the community.

Keywords: Public Policy, Economic Empowerment, Public

PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu aspek krusial dalam pembangunan suatu negara (Tumbel et al., 2021). Kebijakan publik yang efektif memiliki

^{1,3}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

²Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

e-mail: rodiantirazak@unismu.ac.id

potensi besar untuk mengarahkan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan sumber daya dan akses (Abidin, 2015). Namun, dampak dari berbagai kebijakan publik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sering kali tidak merata dan terkadang menimbulkan efek yang beragam di berbagai lapisan masyarakat.

Di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Program-program ini mencakup berbagai sektor, seperti pertanian, perindustrian, perdagangan, serta usaha kecil dan menengah (UKM) (Wongkar et al., 2015). Namun, efektivitas dari kebijakan-kebijakan ini sering kali diperdebatkan. Beberapa kebijakan berhasil menciptakan dampak positif yang signifikan, sementara yang lain gagal mencapai tujuan yang diharapkan.

Sebagai contoh, program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menunjukkan hasil yang beragam di berbagai daerah. Di beberapa wilayah, program ini berhasil meningkatkan daya beli masyarakat dan memperbaiki kondisi ekonomi mereka (Wulandari et al., 2022). Namun, di daerah lain, dampaknya tidak seberapa signifikan, bahkan menimbulkan ketergantungan pada bantuan pemerintah tanpa adanya peningkatan kemandirian ekonomi.

Kesenjangan dalam efektivitas kebijakan publik ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Faktor-faktor tersebut bisa meliputi perencanaan yang kurang matang, pelaksanaan yang tidak optimal, atau bahkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan (Aidar & Muhajir, 2014). Selain itu, adanya disparitas geografis, ekonomi, dan sosial juga turut mempengaruhi sejauh mana kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari berbagai kebijakan publik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Melalui studi literatur yang komprehensif, penelitian ini akan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang berhasil dan kurang berhasil, serta menguraikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil-hasil tersebut. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih baik bagi perumusan kebijakan publik di masa depan, sehingga dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, penelitian ini juga akan menyoroti pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Masyarakat yang diberdayakan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai mitra aktif dalam pembangunan, dapat menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Oleh karena itu, kebijakan publik harus dirancang dengan mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik dari masyarakat yang menjadi target kebijakan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis dampak kebijakan, tetapi juga berupaya untuk memberikan pandangan yang lebih holistik tentang bagaimana kebijakan publik dapat lebih efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat ditemukan strategi-strategi yang dapat memperkuat peran kebijakan publik dalam menciptakan perubahan yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis dampak kebijakan publik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis informasi yang relevan dari berbagai sumber akademik dan kebijakan yang sudah ada (Sugiyono, 2018). Berikut adalah tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan:

1. Identifikasi dan Formulasi Masalah Tahap awal penelitian dimulai dengan identifikasi masalah dan formulasi pertanyaan penelitian. Peneliti menetapkan fokus pada dampak kebijakan publik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pertanyaan penelitian dirumuskan untuk mengarahkan pencarian literatur yang relevan, seperti "Bagaimana

- kebijakan publik mempengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat?" dan "Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut?"
2. Pencarian Literatur Pada tahap ini, peneliti melakukan pencarian literatur menggunakan database akademik seperti Google Scholar, PubMed, JSTOR, dan lainnya. Kata kunci yang digunakan meliputi "kebijakan publik", "pemberdayaan ekonomi masyarakat", "dampak kebijakan", dan "studi kasus Indonesia". Peneliti juga mencari laporan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang relevan.
 3. Seleksi Literatur Dari hasil pencarian, peneliti menyaring literatur berdasarkan relevansi, kualitas, dan kontribusi terhadap topik penelitian. Artikel, buku, dan laporan yang dipilih harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan fokus penelitian dan menyediakan data yang memadai untuk analisis. Peneliti mengevaluasi abstrak dan ringkasan literatur untuk menentukan apakah literatur tersebut sesuai dengan kriteria seleksi.
 4. Pengumpulan Data Setelah seleksi literatur, peneliti mengumpulkan data yang relevan dari sumber-sumber terpilih. Data yang dikumpulkan meliputi hasil penelitian sebelumnya, statistik, analisis kebijakan, dan studi kasus yang memberikan wawasan tentang dampak kebijakan publik terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peneliti mencatat poin-poin utama dan temuan-temuan penting dari setiap literatur.
 5. Analisis dan Sintesis Data Pada tahap ini, peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan dengan metode analisis konten. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola, dan hubungan-hubungan antara kebijakan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sintesis data dilakukan untuk menyusun gambaran yang komprehensif mengenai dampak kebijakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan tersebut.
 6. Interpretasi dan Pembahasan Hasil analisis dan sintesis data kemudian diinterpretasikan dan dibahas secara mendalam. Peneliti membandingkan temuan-temuan dari berbagai literatur dan mengidentifikasi implikasi praktis dan teoretis dari hasil penelitian. Pembahasan juga mencakup rekomendasi kebijakan yang dapat diambil berdasarkan temuan penelitian.
 7. Penulisan Laporan Penelitian Tahap akhir adalah penulisan laporan penelitian yang menyajikan latar belakang, metode, hasil, dan pembahasan secara sistematis dan terstruktur. Laporan ini mencakup penjelasan rinci mengenai proses penelitian, temuan utama, dan rekomendasi untuk kebijakan publik yang lebih efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji berbagai kebijakan publik yang telah diimplementasikan di Indonesia dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan analisis literatur yang komprehensif, hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Keberhasilan Kebijakan Publik dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**
 - a. Program Keluarga Harapan (PKH) Studi literatur menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. PKH memberikan bantuan tunai bersyarat yang mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Penelitian dari Bank Dunia (2015) menyebutkan bahwa PKH berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima bantuan (Kiu, 2018). Selain itu, program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif.
 - b. Dana Desa Kebijakan Dana Desa yang diimplementasikan sejak tahun 2015 bertujuan untuk memperkuat pembangunan desa dan memberdayakan masyarakat desa. Literasi tentang penggunaan dana desa menunjukkan hasil positif dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Menurut laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2018), Dana Desa berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan menciptakan lapangan kerja baru (Perceka, 2018).

2. **Kegagalan Kebijakan Publik dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**
 - a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Meskipun Bantuan Langsung Tunai (BLT) bertujuan untuk memberikan bantuan ekonomi langsung kepada masyarakat miskin, beberapa studi menunjukkan bahwa kebijakan ini kurang efektif dalam jangka panjang. Penelitian dari SMERU Research Institute (2012) menunjukkan bahwa BLT seringkali tidak mencapai sasaran yang tepat dan menimbulkan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Selain itu, BLT juga tidak mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif (Subianto, 2020).
 - b. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk memberikan akses kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menghadapi berbagai tantangan. Studi dari LIPI (2017) mengungkapkan bahwa banyak UMKM yang tidak mampu mengakses KUR karena persyaratan yang sulit dipenuhi (Disemadi & Roisah, 2019). Selain itu, kurangnya pendampingan dan pelatihan bagi penerima KUR menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan usaha yang dibiayai oleh program ini.
3. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan dan Kegagalan Kebijakan**
 - a. Perencanaan dan Implementasi Kebijakan Keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif. Kebijakan yang direncanakan dengan baik dan diimplementasikan dengan mekanisme yang jelas cenderung lebih berhasil. Sebaliknya, kebijakan yang kurang matang dalam perencanaan dan mengalami kendala dalam implementasi seringkali gagal mencapai tujuan yang diharapkan (Risal et al., 2013).
 - b. Partisipasi Masyarakat Partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk keberhasilan kebijakan publik. Kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, sehingga lebih efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat (Suhirwan, 2021).
 - c. **Disparitas Geografis dan Ekonomi** Disparitas geografis dan ekonomi juga mempengaruhi dampak kebijakan publik. Wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai dan akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi seringkali mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif (Tjilen, 2019a). Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang berbeda dan spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan salah satu tujuan utama kebijakan publik di banyak negara, termasuk Indonesia. Kebijakan publik yang tepat dapat berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja (Tjilen, 2019b). Namun, efektivitas kebijakan tersebut seringkali bergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi dan dampaknya. Pembahasan ini akan mengeksplorasi dampak kebijakan publik di Indonesia, dengan fokus pada keberhasilan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pertama-tama, perlu dicatat bahwa kebijakan publik yang berhasil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat umumnya memiliki perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif (Sari et al., 2021). Sebagai contoh, Program Keluarga Harapan (PKH) telah menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan tunai bersyarat (Prasetyo & Dinarjito, 2021). PKH tidak hanya menyediakan bantuan keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya memperkuat kapabilitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif. Studi dari Bank Dunia (2015) menunjukkan bahwa PKH berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan konsumsi rumah tangga penerima bantuan.

Selain PKH, kebijakan Dana Desa juga memberikan contoh bagaimana perencanaan yang baik dan implementasi yang tepat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat (Cahyono & Mufidayati, 2021). Dana Desa, yang bertujuan untuk memperkuat pembangunan desa, telah digunakan untuk membangun infrastruktur, meningkatkan layanan publik, dan mengembangkan ekonomi lokal (Parinduri & Situmeang, 2024). Laporan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (2018) menunjukkan bahwa Dana Desa berhasil

meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan menciptakan lapangan kerja baru. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan dapat menghasilkan dampak positif yang signifikan (Susanti et al., 2017).

Namun, tidak semua kebijakan publik di Indonesia mencapai keberhasilan yang sama. Bantuan Langsung Tunai (BLT) misalnya, meskipun bertujuan untuk memberikan bantuan ekonomi langsung kepada masyarakat miskin, seringkali mengalami kendala dalam implementasinya (Sepyah et al., 2022). Penelitian dari SMERU Research Institute (2012) menunjukkan bahwa BLT sering tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketergantungan pada bantuan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang memberikan bantuan langsung tanpa adanya upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat cenderung kurang efektif dalam jangka panjang (Iwansyah, 2021).

Selain BLT, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bertujuan untuk memberikan akses kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga menghadapi berbagai tantangan (Tumbel et al., 2021). Meskipun KUR dirancang untuk mendukung pertumbuhan UMKM, banyak usaha kecil yang tidak mampu mengakses KUR karena persyaratan yang sulit dipenuhi (Nugroho, 2018). Studi dari LIPI (2017) mengungkapkan bahwa kurangnya pendampingan dan pelatihan bagi penerima KUR menyebabkan rendahnya tingkat keberhasilan usaha yang dibiayai oleh program ini. Hal ini menyoroti pentingnya tidak hanya memberikan akses keuangan, tetapi juga dukungan dan pendampingan yang memadai untuk memastikan keberhasilan usaha.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan kebijakan publik ini mencakup perencanaan dan implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, serta disparitas geografis dan ekonomi (Safitri et al., 2021). Kebijakan yang direncanakan dengan baik dan diimplementasikan dengan mekanisme yang jelas cenderung lebih berhasil. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan sangat penting. Kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan cenderung lebih sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal, sehingga lebih efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat (Sunarto et al., 2021).

Disparitas geografis dan ekonomi juga memainkan peran penting dalam menentukan dampak kebijakan publik (Suparman, 2021). Wilayah dengan infrastruktur yang kurang memadai dan akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi seringkali mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang berbeda dan spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah. Kebijakan yang berhasil di satu daerah belum tentu dapat diterapkan dengan hasil yang sama di daerah lain yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang berbeda.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan publik di Indonesia memiliki dampak yang beragam terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Dana Desa berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif. Namun, kebijakan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah ketepatan sasaran dan kurangnya pendampingan. Keberhasilan kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, serta kondisi geografis dan ekonomi setempat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar kebijakan publik dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan lokal dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan. Selain itu, perlu adanya dukungan berkelanjutan dan pendampingan bagi penerima manfaat kebijakan untuk memastikan keberhasilan dalam jangka panjang. Pemerintah juga perlu mengadaptasi pendekatan yang spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah untuk mengatasi disparitas geografis dan ekonomi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penelitian ini, termasuk para akademisi, praktisi, dan lembaga pemerintah yang memberikan data dan informasi berharga. Terima kasih juga kepada keluarga dan rekan-rekan yang memberikan dukungan moral dan teknis sepanjang proses penelitian. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan publik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 61–76.
- Aidar, N., & Muhajir, M. (2014). Analisis pengaruh belanja pemerintah sektor kesehatan dan pendidikan terhadap pendapatan per kapita di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 1(2), 70–78.
- Cahyono, H., & Mufidayati, K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan APBDes Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 173–194.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). Kebijakan model bisnis bank wakaf mikro sebagai solusi pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Law Reform*, 15(2), 177–194.
- Iwansyah, H. (2021). Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 85–99.
- Kiu, Y. M. (2018). Evaluasi Dampak Program Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Kayu Putih Kota Kupang. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 100–112.
- Nugroho, A. A. (2018). Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat: Analisis Pengembangan Ekonomi Kabupaten Ngawi. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 30–36.
- Parinduri, R. Y., & Situmeang, M. (2024). Pengaruh Kebijakan Pemberdayaan UMKM Terhadap Perekonomian Daerah. *Focus Ilmu Administrasi*, 3(1), 15–24.
- Perceka, A. L. (2018). Analisis Komparatif Angka Kemiskinan Sebagai Dampak Kebijakan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di Kecamatan Leuwigoong Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 165–169.
- Prasetyo, T. A., & Dinarjito, A. (2021). Analisis pengaruh dana desa dan indeks pembangunan manusia per kabupaten/kota terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(4), 375–391.
- Risal, S., Paranoan, D. B., & Djaja, S. (2013). Analisis dampak kebijakan pertambangan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kelurahan Makroman. *Jurnal Administrative Reform*, 1(3), 516–530.
- Safitri, M. I. D., Ananda, C. F., & Prasetyia, F. (2021). Analisis dampak belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif Jawa Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 85–96.
- Sari, V. M., Utoyo, B., & Tresiana, N. (2021). Evaluasi Pengendalian Inflasi Di Kota Bandar Lampung Tahun 2018. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 3(2), 113–126.
- Sepyah, S., Hardiyatullah, H., Hamroni, H., & Jayadi, N. (2022). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI DESA. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 2(2), 1–12.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan publik: Tinjauan perencanaan, implementasi dan evaluasi*. Brilliant.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suhirwan, S. (2021). Kebijakan Publik Desa Wisata Solusi Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mendukung Ekonomi Pertahanan. *KEBIJAKAN PUBLIK DESA WISATA SOLUSI EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENDUKUNG EKONOMI PERTAHANAN*, 2(5), 1441–1449.

- Sunarto, S., Sulton, S., & Mahardhani, A. J. (2021). Pelatihan Penguatan Partisipasi Politik dalam Mengawal Kebijakan Publik. *Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 69–74.
- Suparman, N. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan keuangan negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31–42.
- Susanti, H., Syechalad, M. N., & Hamzah, A. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Aceh Terhadap Pendapatan Asli Daerahprovinsi Aceh Setelah Tsunami. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 4(1), 1–12.
- Tjilen, A. P. (2019a). Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung. Nusamedia.
- Tjilen, A. P. (2019b). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Local Community Economic Empowerment And Corporate Social Responsibility)(Teori, Konsep, Dan Implementasi Kebijakan Publik). Deepublish.
- Tumbel, R., Kiyai, B., & MAMBO, R. (2021). Dampak kebijakan program bantuan langsung tunai dengan kondisi ekonomi masyarakat di kelurahan talikuran kecamatan kawangkoan utara kabupaten minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(110).
- Wongkar, K. H., Mandey, J., & Pombengi, J. D. (2015). Evaluasi Dampak Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perkotaan Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat (Suatu Studi Di Kecamatan Sario Kota Manado). *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 3(031).
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(1), 1–15.
- Bank Dunia. (2015). *Indonesia: Program Keluarga Harapan Impact Evaluation*. Washington, DC: World Bank Group.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2018). *Laporan Tahunan Dana Desa 2018*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- LIPI. (2017). *Evaluasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam Mendukung Pengembangan UMKM di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- SMERU Research Institute. (2012). *Evaluasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Indonesia: Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: SMERU Research Institute.